



WALI Kota Batam HM. Rudi (memegang mikrophone) saat peninjauan pelaksanaan PM-PIK tahun anggaran 2017 di Kecamatan Sekupang, Senin (9/4).

## PM-PIK 2018 Dimulai Juli

**P**EMERINTAH Kota Batam fokuskan program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi jalan lingkungan dan drainase.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menargetkan, program PM-PIK yakni jalan-jalan lingkungan rampung di akhir masa jabatan. Sehingga pembangunan merata dikerjakan tidak hanya jalan utama yang menjadi prioritas saat ini.

"Saya tahu permintaan banyak, tapi yang saya ambil yang besar-besar saja. Seperti jalan setapak, drainase. Maka Perwako saya buat dua hal itu," kata Rudi, di sela-sela peninjauan pelaksanaan PM-PIK tahun anggaran 2017, di Kecamatan Sekupang, Senin (9/4).

Selain permintaan warga yang banyak, Rudi mempersilahkan masyarakat setempat untuk menambah sejumlah PIK. Namun, dianggap menjadi prioritas di lingkungannya.

"Mau ditambah silakan, misal jadi lima item, tapi yang terbesar saja. Kalau semua masuk, pusing nanti. Nanti posyandu, poskamling, gedung serbaguna mau

masuk juga," ucapnya.

Tahun ini kebijakan yang dikeluarkan Pemko Batam dana yang dikuncurkan untuk PIK sebesar Rp 1,1 miliar tiap kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok kerja. Sedangkan dinas, kecamatan, dan kelurahan hanya bersifat pendampingan, mengawasi, dan membantu dalam hal pelaporan karena dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kebijakan saya harus di atas Rp 1 miliar dana PIK ini. Karena dari 2011 saya Wakil Wali Kota, keluhan warga itu-itu saja. Contohnya, jalan berlubang, parit banjir. Maka jatah Bapak Ibu tidak saya kurangkan," ulas Rudi.

Ia berharap untuk PM-PIK 2018 sudah mulai dikerjakan pada Juli mendatang. Agar pelaksanaannya selesai tepat waktu. Dan ia menegaskan, baik dinas maupun kecamatan dan kelurahan harus betul-betul melakukan pengawasan. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi program dijalankan. Sehingga pihaknya akan berusaha menaikkan anggaran di tahun depan.

"Dulu saya pikir susah Rp 1,1 miliar. Ternyata bisa juga. Tahun

depan kita paksakan Rp 1,3 miliar. Terkadang dipaksa itu perlu juga, tapi harus tepat," tegas Wako.

Rudi, akan berkeliling melanjutkan peninjauan PM-PIK yang dikerjakan tiap kelurahan di 12 kecamatan se-Batam. Kunjungan, untuk melihat sejauh mana pengerjaan dilakukan.

"Pertama yang ditinjau Pak Wali PIK Tiban Lama, balai serba guna. Berlanjut Tiban Baru dan kelurahan lainnya. Tujuannya untuk melihat sejauh mana pengerjaan PIK, tahun 2017 lalu," sebut Camat Sekupang, Muhammad Arman.

Adapun jumlah kegiatan PIK di Sekupang pada tahun anggaran 2017 sebanyak 67 proyek. Terbagi di Kelurahan Tiban Indah 7 kegiatan, Tiban Lama 14 kegiatan, Patam Lestari 9 kegiatan, Sei Harapan 15 kegiatan, Tiban Baru 6 kegiatan, Tanjungriau 13 kegiatan, dan Tanjungpinang 3 kegiatan.

Bentuk kegiatannya antara lain pembangunan atau rehabilitasi jalan, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah.(hbb)

# Pasar Harus DIAWASI

**M**ENANGGAPI kasus masih adanya pungutan liar (Pungli) di pasar tradisional, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, agar berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar melakukan penjagaan dan pengawasan di lapangan. Selain itu, pihak dari disperindag juga harus ditempatkan satu per satu di pasar, untuk mengawasi.

Dikatakan Nuryanto, mengenai masalah Pungli, ia meminta agar semua harus kembali ke aturan main. Ia meminta pemerintah, terutama disperindag, agar dapat memetakan pungutan-pungutan liar di pasaran.

"Kiranya didalam melaksanakan tugas, ketentuan harus ada. Jangan sampai ada pungli yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya nambah beban," kata Nuryanto, Senin (9/4).

Dengan adanya Pungli, Nuryanto takut hal ibi akan menambah *cost* beban kepada pembeli. Pasalnya, jika ada pelaku jasa di pasar, maka tentu akan menaikkan harganya karena ada pungutan. Begitu juga terhadap penjual barang.

"Jangan sampai jadi inflasi. Kita harus sepakat, ada pengawasan dan tindakan konkret. Jangan sampai ada pungli," tegasnya.

Sementara untuk kordinasi dengan Satpol PP, hal itu harusnya sudah menjadi kewajiban. Tanpa disuruh, harusnya Disperindag terutama yang bagian pasar, sudah tahu cara kerjanya. "Mestinya juga harus ada pengawasan setiap hari. Itu pekerjaannya. Harus keliling.

Harus cek," pungkasnya.

Sebelumnya, banyak pedagang pasar di Batam, yang mengeluhkan tentang semakin tidak kondusifnya situasi lapangan. Berbagai permasalahan seperti pungutan liar, sampah yang membusuk, dan pedagang kaki lima yang mengganggu jalan dan menutupi pedagang pasar, disampaikan dalam rapat antara pedagang pasar dengan Disperindag Kota Batam.

Salah satu pedagang di Pasar Suka Ramai, Sagulung, mengatakan bahwa jumlah pedagang kaki lima di pasar, jauh lebih banyak ketimbang pedagang pasar. Dan saking membeludaknya, banyak yang tak bisa diatur dan mengganggu pedagang pasar.

Bahkan karena masih banyak kios yang kosong, pihaknya mengajak PK5 untuk berjualan di kios yang kosong di dalam pasar, secara gratis. Asalkan membayar iuran kebersihan dan air.

"Mereka dikasih tempat gratis-pun tak mau. Alasannya tak nampak orang. Padahal mereka juga dipungut loh. Tapi tak tau uangnya sama siapa," kata salah seorang pedagang yang namanya tak mau disebutkan.

Sementara anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging mengatakan bahwa, masalah pungli dan sampah yang ada, bukan masalah yang baru. Dalam hal ini, Pemerintah diminta proaktif dalam pengawasan. "Ini sesuatu yang terang-benderang. Harusnya bisa tahu. Karena monitor bagaimana praktek penjualan, harus disikapi. Saya khawatir dinas terkait terlibat dalam hal ini. Karena saya anggap ini sudah terjadi pembiaran," papar Uba.(iik)